



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TONY HARISINTA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 225742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.873.600.000

1. Tanah Seluas 946 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 810 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 61.500.000
7. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
WARISAN Rp. 125.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/70 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 140.360.000
10. Tanah Seluas 506 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 146.740.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 281.000.000



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 270.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	453.429.238
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.688.329.238
III. HUTANG	Rp.	186.841.171
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.501.488.067

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.